

Ruang Lingkup penelitian skripsi ini meliputi kurun waktu 1998-2003, sehingga menjadi tantangan yang menarik bagi penulis untuk dikaji sebagai penelusuran sejarah. Periodisasi waktu yang dibahas dalam penulisan ini, memungkinkan penulis untuk bertemu dengan pelaku sejarah yang pernah terlibat dalam Gerakan Dakwah Kampus dan melakukan kegiatan wawancara dengan nara sumber yang terkait erat dari pendirian SALAM tahun 1998 sampai dengan perkembangannya tahun 2003.

menyusul aksi dan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dalam mengoreksi kebijakan pemerintah. Lima tahun kemudian Menteri P dan K juga mengeluarkan peraturan tentang NKK / BKK<sup>41</sup> yang membatasi eksistensi Gerakan Mahasiswa<sup>42</sup>.

NKK / BKK merupakan salah satu produk kebijakan pemerintah Orde Baru yang diterapkan dalam rangka membuat posisi negara semakin kuat. Menteri P dan K pada waktu itu Dr. Daud Yusuf mengeluarkan Surat Keputusan No. 0156/U/1978 tertanggal 19 April 1978 tentang *Normalisasi Kehidupan Kampus*, yang dikenal dengan NKK, dan SK No. 037/U/1979 tentang Bentuk Susunan Lembaga/Organisasi Mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi, lebih dikenal dengan nama BKK<sup>43</sup>.

Sejak pemberlakuan NKK / BKK, kebijakan ini telah menimbulkan kontroversi, baik dalam wacana gerakan mahasiswa maupun wacana pentas politik mahasiswa. Pemberlakuan NKK/BKK merupakan reaksi pemerintah terhadap gerakan mahasiswa yang semakin sulit dikendalikan<sup>44</sup>. Puncak dari sikap gerakan

## **BAB II**

### **DAMPAK DAN PENGARUH NORMALISASI KEHIDUPAN KAMPUS / BADAN KOORDINASI KAMPUS BAGI DUNIA KAMPUS**

#### **2.1. Situasi Kampus 1980-1990**

Tahun 1974 Menteri P dan K mengeluarkan SK No. 28, yang membatasi kegiatan-kegiatan Dewan Mahasiswa

<sup>41</sup> Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kampus lebih dikenal dengan istilah NKK/BKK. Terlampir.

<sup>42</sup> Ridwan Saidi, *op. cit.*, hal. 65.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Maksud penulis dengan “Sulit terkendali” dalam arti menuntut perubahan dengan cara keras dan tegas, seperti aksi atau demonstrasi.

mahasiswa adalah pada momentum pencalonan Presiden Soeharto untuk terpilih yang ketiga kali. Mahasiswa mendesak MPR, untuk menolak pencalonan tersebut dengan melakukan berbagai aksi, seperti Buku Putih Perjuangan Mahasiswa ITB 1978 dan pernyataan 50 Dewan Mahasiswa (DM) se-Indonesia<sup>45</sup>.

Sikap mahasiswa yang mendesak MPR, lebih dikenal "*MPR jalanan*". Tindakan protes mahasiswa cukup besar. Perwakilan UI adalah Dipo Alam sebagai pimpinan dan Lukman Hakim dari FMIPA. Mahasiswa menilai bahwa kepemimpinan Soeharto sebagai presiden perlu dikoreksi. Sehingga mereka menjadi *MPR jalanan*, yang praktis setiap pertemuan mengoreksi kebijakan Soeharto. Tokoh yang didukung oleh mahasiswa untuk menggantikan Soeharto adalah Ali Sadikin<sup>46</sup>.

Ali Sadikin pada saat itu, sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang sedang dimasa akhir jabatan pemerintahan. Para Mahasiswa mendukung Ali Sadikin menggantikan Soeharto sebagai presiden. Gelombang gerakan mahasiswa yang

mendukung pergantian tersebut cukup besar<sup>47</sup>. Sehingga Soeharto melihat sebagai ancaman dan berbahaya. Bahkan militer pernah masuk ke kampus, Arief Rahman Hakim (ARH) Salemba UI.

Penyikapan mahasiswa dianggap telah mengambil isu yang sensitif dalam perjalanan gerakan mahasiswa pada masa Orde Baru. Gerakan mahasiswa yang mengangkat isu kepemimpinan nasional oleh berbagai pihak dipandang sangat beresiko tinggi. Aksi dan penyikapan oleh gerakan mahasiswa membuat pemerintah berusaha meredam, sehingga perlu adanya penormalan kehidupan kampus.

Istilah penormalan lekat dengan konsep stabilitas politik Orde Baru yang sedang gencar melakukan pembangunan. Penyikapan gerakan mahasiswa dengan aksi dan demonstrasi, dianggap telah mengganggu pembangunan dan stabilitas politik, apalagi menyangkut dengan isu kepemimpinan nasional, yaitu Presiden Soeharto. Menanggapi penyikapan mahasiswa yang semakin tidak terkendali, Kepala Staf Komando Keamanan dan Ketertiban (Kaskopkamtib), Sudomo turun tangan dengan mengeluarkan surat keputusan yang membekukan Dewan Mahasiswa, tanggal 21 Januari 1978<sup>48</sup>. Kemudian ditindaklanjuti oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri P & K,

<sup>45</sup> Pada awalnya sikap mahasiswa dilakukan karena penolakan pemberlakuan NKK/BKK dan berlanjut kepada penolakan mahasiswa terhadap pencalonan presiden untuk yang ketiga kali. Hariyadhie, *Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978 Dalam Percaturan Politik Nasional*, (Jakarta : Golden Terayon Press, 1994), hal. 8.

<sup>46</sup> Wawancara dengan DR. Agus Nur Hadi FMIPA Kimia UI'78. Kamis, 26 Maret 2009. Wawancara dilakukan di rumahnya jln. Griya Asri, Depok pada pukul 09.00 WIB.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Ridwan Saidi, *op. cit.*, hal. 72.

yaitu Daud Yusuf.

Menurut DR. Daud Yusuf, konsep NKK adalah pengembalian fungsi mahasiswa dari kekuatan massa menjadi kekuatan intelektual (*the power reason*). NKK yang dimaksud adalah meredefinisi lembaga-lembaga kemahasiswaan secara mendasar, fungsional dan bertahap sehingga kepribadian mahasiswa yang di universitas dapat menjadi intelektual yang sesungguhnya, yaitu menjadi individu yang mampu menganalisa<sup>49</sup>. Penganalisa yang dimaksud adalah mahasiswa yang memperkuat penalaran individu, kemampuan berfikir analitis dan sintesis agar siap terjun dalam dunia keilmuan dan kemasyarakatan.

Pemikiran NKK kemudian dijabarkan oleh BKK yang mengatur secara teknis pembentukan lembaga kemahasiswaan, seperti Senat Mahasiswa (SM) dan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) baik tingkat fakultas maupun universitas<sup>50</sup>. Dalam konsep BKK, lembaga dan kegiatan kemahasiswaan termasuk ke dalam pengawasan birokrasi

kampus, yakni rektorat dan dekanat.

Pembekukan *student government* (pemerintahan mahasiswa)<sup>51</sup> dan dikeluarkan kebijakan NKK / BKK, menimbulkan pandangan ketidakberhasilan gerakan mahasiswa yang sudah tidak mempunyai kekuatan aksi dalam pentas politik nasional<sup>52</sup>. Posisi tawar gerakan mahasiswa yang menjadi lemah membuat aktivis mahasiswa melakukan kajian-kajian terhadap pola-pola gerakan-gerakan mahasiswa yang pernah dilakukan.

Menurut DR. Agus Nur Hadi<sup>53</sup>, kebijakan NKK / BKK yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru memang tetap mempersilahkan kehidupan kampus untuk berpolitik. Akan tetapi lingkup politik hanya dalam kampus saja dan orang luar tidak diperbolehkan untuk berpolitik di kampus. Pihak kampus dipersilahkan untuk berpolitik, akan tetapi hanya lingkup diskusi atau wacana. Sehingga diterjemahkan oleh mahasiswa bahwa

<sup>49</sup> Untuk lebih mengetahui lebih dalam, lihat salinan Surat Keputusan Menteri P & K RI No. 0156/U/1978 tentang NKK.

<sup>50</sup> Konsep BKK tertuang dalam instruksi Direksi Jenderal P & K No. 002/DJ/Inst/1978 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi. Ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Prof. Dr. A. Tisna Amidjaja dan berlaku sejak 17 Mei 1978. Dan kemudian dikukuhkan Instruksi Direktur Jenderal dengan SK Menteri P & K No 037/U/1979.

<sup>51</sup> Memang Sudomo, hanya membubarkan Dema yang berperan dalam aksi-aksi protes dan sarana solidaritas mahasiswa, pada kenyataannya semua lembaga (Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Senat Mahasiswa Fakultas, Badan Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas) ikut berperan. Dengan Dema dibubarkan, otomatis lembaga-lembaga kemahasiswaan tidak berfungsi.

<sup>52</sup> Suryadi A. Rajab, "Gerakan Mahasiswa dan Pekerja", makalah yang disampaikan dalam *Diskusi Mahasiswa dan Politik SM FISIP UI*, 24 September 1997.

<sup>53</sup> Agus Nur Hadi FMIPA Kimia angkatan 78. Tokoh generasi pertama Gerakan Dakwah Kampus, diantaranya DR. Agus Nur Hadi, Musoli, Ihsan Tanjung, Fahmi Alaidrus, Nurlitasari.

tidak ada lagi politik praktis di kampus. Padahal mahasiswa mempunyai pemikiran bahwa politik bukan hanya di dalam kelas (kuliah), namun juga memberikan kontribusi bagi masyarakat. Dampak yang terjadi adalah tidak adanya lagi tokoh-tokoh politik dan kemasyarakatan untuk memberikan ceramah atau berdiskusi dengan mahasiswa kecuali atas izin aparat pemerintah atau birokrasi kampus. Setiap kegiatan kemahasiswaan juga diharuskan meminta izin kepada birokrasi kampus<sup>54</sup>.

Kebijakan NKK / BKK bahkan bukan hanya berpengaruh terhadap pola gerakan mahasiswa, tetapi berdampak besar bagi kehidupan mahasiswa di kampus. Konsep NKK diterapkan di lingkungan Perguruan Tinggi dengan diberlakukan mekanisme baru yaitu pemberlakuan SKS, Sistem Kredit Semester. Pemberlakuan tersebut menuntut mahasiswa memberikan waktu secara penuh untuk kuliah, suatu kegiatan yang dikenal dengan *Study Oriented* (berorientasi kuliah saja). Sehingga mahasiswa mengalami keterbatasan kesempatan untuk melakukan kegiatan kemahasiswaan dan menyampaikan aspirasinya<sup>55</sup>. Pada dasarnya pemberlakuan SKS memunculkan dampak positif maupun negatif. Akan tetapi, pemberlakuan BKK membawa

dampak kepada kontrol yang kuat dari birokrasi Perguruan Tinggi atas kelembagaan kemahasiswaan intra kampus.

Demonstrasi yang dilakukan 1978-1979 memang lebih banyak ditujukan kepada BKK, daripada NKK. Mahasiswa tampaknya kurang menyadari dengan konsep NKK, maka kehidupan kampus lebih mempunyai warna untuk belajar, daripada aktivitas organisasi (*Study activity*). Dengan konsep SKS, kelak akan banyak lahir sarjana dengan usia muda, 24 tahun. Bahkan tidak sedikit yang berusia 22-23 tahun yang menyandang gelar sarjana<sup>56</sup>. Dampak tersebut disebabkan oleh adanya batas waktu studi untuk menyelesaikan kuliah.

Pemberlakuan NKK memang banyak dirasakan oleh ormas mahasiswa. Jadwal kuliah yang ketat, membuat minat mahasiswa mengendur untuk menggeluti kegiatan organisasi kemahasiswaan. Sementara itu, kelembagaan mahasiswa yang dibentuk berdasarkan proses dari atas, yaitu pihak rektorat atau dekanat, membuat mahasiswa hanya menerima saja tawaran dari atas. Sehingga bukan berdasarkan proses yang berjalan dari bawah seperti era Dewan Mahasiswa<sup>57</sup>. Segi positif perubahan tersebut birokrasi Perguruan Tinggi atau Universitas

<sup>54</sup> Wawancara DR. Agus Nur Hadi.

<sup>55</sup> Ridwan Saidi., *op. cit.*, hal. 65.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

bertanggung jawab terhadap pendanaan kegiatan mahasiswa. Namun muncul dampak negatif, yaitu potensi kepemimpinan mahasiswa tidak berkembang sebagaimana mestinya.

Adapun adaptasi terhadap kebijakan NKK / BKK, melahirkan format baru gerakan mahasiswa pasca NKK / BKK pada tahun 1980-an. Kalau sebelumnya disekitar tahun 1978 marak dengan aksi mahasiswa dengan cara melakukan demonstrasi di jalanan, kemudian beradaptasi dengan mulai menjamurnya kelompok-kelompok studi dikalangan mahasiswa. Aktivitas mahasiswa dengan membentuk kelompok-kelompok studi bertujuan untuk melakukan gerakan penyadaran diantara mahasiswa dengan dituangkannya gagasan-gagasan untuk didiskusikan secara bersama, baik mengidentifikasi masalah maupun upaya penyelesaian masalah. Transformasi yang terjadi bukan berarti kelompok-kelompok tersebut sebelumnya tidak ada, akan tetapi dengan penerapan konsep normalisasi mempunyai korelasi signifikan terhadap kemunculan kelompok-kelompok studi yang didirikan mahasiswa. Menurut Arbi Sanit transformasi gerakan mahasiswa ini dapat diartikan sebagai melemahnya peran

mahasiswa<sup>58</sup>.

Pada zaman Dema (Dewan mahasiswa), peran mahasiswa cukup kental dengan diwakili oleh Dema-Dema Perguruan Tinggi. Gerakan mahasiswa saat itu berani mengambil isu nasional yang cukup sensitif dan menjadi kekuatan yang berpengaruh. Penulis mengungkapkan hal ini, bukan berarti hanya Dema yang menjadi motor gerakan mahasiswa. Akan tetapi, pasca kebijakan NKK / BKK gerakan mahasiswa yang terbentuk dipandang rapuh dan lemah (*powerless*) dalam sistem pengorganisasian. Permasalahan tersebut terjadi karena depolitisasi, deideologi dan debirokratisasi serta tidak kuat basis politik mahasiswa<sup>59</sup>.

Kondisi tersebut semakin diperjelas dari keorganisasian ekstra kampus yang tidak eksis karena terkooptasi dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Bagi KNPI konsep-konsep normalisasi secara strategis adalah benar, hanya rasionalisasi dalam menjalankan kebijakan agar lebih mulus. Menanggapi aksi penentangan yang dilakukan mahasiswa, KNPI meminta bukti kelemahan dan kekurangan dari konsep normalisasi kampus serta meminta solusi alternatif lain. Mahasiswa seharusnya tidak

<sup>58</sup> Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan : Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moral dan Politik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hal. 46-47.

<sup>59</sup> *Ibid.*

terjebak dalam aksi-aksi emosional yang mencari popularitas<sup>60</sup>. Dampak kebijakan pasca NKK / BKK gerakan mahasiswa mudah dibatasi oleh pemimpin yang berkuasa, bahkan rentan terjadi perselisihan di antara aktivis gerakan sendiri.

## 2.2. Dinamika Gerakan Mahasiswa Islam di Indonesia

Sebelum Kemunculan Gerakan Dakwah Kampus, ada dua ormas keislaman di kalangan mahasiswa, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Kedua organisasi telah berdiri lebih dulu dibandingkan dengan kegiatan Gerakan Dakwah Kampus. Secara tidak langsung kedua organisasi tersebut menimbulkan kelahiran Dakwah Kampus, disaat organisasi ekstra kampus dibatasi oleh pemerintah dan birokrasi kampus.

### 2.2.1. Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI)

Pola pikir yang mewarnai perjalanan politik umat Islam adalah keinginan untuk menjadikan Islam sebagai sistem yang total dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Adapun dua alasan gagasan dan

cita-cita umat yang mendasari. Pertama, Islam adalah agama terakhir dan memiliki sistem terlengkap dan sempurna. Kedua, kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda diperjuangkan oleh mayoritas umat Islam. Dalam konteks dan semangat ini Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dilahirkan dengan suasana dan semangat revolusi yang sangat kuat<sup>61</sup>.

Proses pembentukan HMI tidak mempunyai ikatan secara langsung dengan organisasi cendekiawan muda Islam yang berdiri pada pra-kemerdekaan, baik *Jong Islamieten Bond* (1925) maupun *Studenten Islam Studeiclub* (1934). Akan tetapi pendirian HMI secara aspiratif dan spirit sulit dilepaskan hubungan HMI dengan JIB dan SIS<sup>62</sup>.

Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan dari pihak Belanda, pada 8 maret 1942, Jepang membubarkan ormas dan parpol, termasuk JIB dan SIS. Jepang juga menutup perguruan tinggi, kecuali *Geneeskundige Hogeschool* (Sekolah Tinggi Kedokteran), yang kelak dibuka kembali dengan nama Ika Daigaku<sup>63</sup>.

Dunia pendidikan yang vakum merangsang tokoh-tokoh Islam dan kebangsaan mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI). Maka pada tahun 1944

<sup>60</sup> Bambang W. Kusuma dan Amir Sirait ketika berbicara Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR, *Merdeka*. 16 November 1979.

<sup>61</sup> Egi Sujana, dalam pengantar M. Rusli Karim, *HMI-MPO Dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia*, hal 12.

<sup>62</sup> Ridwan Saidi, *op. cit.*, hal. 19.

<sup>63</sup> *Ibid.*

dibentuk panitia di bawah pimpinan Hatta (Ketua) dan M. Natsir (Sekretaris). Hasil ujian menerima 20 mahasiswa dengan status penuh dan 20 status pendengar. Para pengajar secara umum berasal dari aktivis pergerakan yang mempunyai latar belakang akademis, misal H. Agus Salim (Penasehat JIB), Mr. Abdul Karim (Mantan ketua SIS), Dr. Abu Hanifa dan Kahar Muzakir<sup>64</sup>.

Kegiatan akademis STI di Jakarta tidak berlangsung lama, karena Jakarta mengalami pendudukan Jepang. STI dipindah ke Yogyakarta. Akhir tahun 1946, seorang pemuda bernama Lafran Pane mendaftarkan diri ke STI. Lafran Pane adalah tokoh yang berlatar belakang nasionalis, kemudian diberi warna Islam oleh STI yang memiliki aroma perjuangan Islam.

Tepat pada tanggal 5 Februari 1947, HMI resmi didirikan dengan meminta izin memakai ruangan kelas dan Muchtar Jahja (dosen yang mengajar waktu itu) mengizinkan. Pendirian keorganisasian berlangsung dengan lancar tanpa banyak hambatan yang berarti<sup>65</sup>. HMI dideklarasikan oleh Lafran Pane bersama Kartono, Dahlan Husein dan Maisaroh Hilal, semuanya adalah mahasiswa STI. Victor Tanja dalam mengatakan bahwa Lafran Pane mengakui

pendirian organisasi tersebut terkesan tergesa-gesa karena sudah demikian mendesak untuk segera didirikan<sup>66</sup>.

Secara pemikiran, Lafran Pane hanya meneruskan definisi permasalahan Islam yang telah dirumuskan oleh JIB-SIS. Tahun 1949, Lafran Pane berpidato di depan Kongres Muslimin Indonesia. Ia menyampaikan tentang pelajar Indonesia yang beragama Islam, tetapi malu mengaku muslim<sup>67</sup>. Namun isi yang disampaikan merupakan ulangan dari pidato dan tulisan Syamsurijal (JIB) dan Abdul Karim (SIS) tentang permasalahan yang sama. Kedua tokoh tersebut menggarap permasalahan jauh lebih dalam dari Lafran Pane.

Tujuan pendirian HMI dirumuskan oleh Lafran Pane dan kawan-kawan dalam dua tujuan. Pertama, mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Kedua, menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam<sup>68</sup>.

Kehadiran tokoh berlatar belakang perjuang Islam seperti Dachlan Ranuwiharjo ke dalam tubuh HMI tahun 1948, membuat kegiatan ormas semakin semarak. Tahun 1950, HMI pindah ke

<sup>66</sup> Victor Tanja, *HMI, Sejarah dan Kedudukan di Tengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharu*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1991)

<sup>67</sup> Ridwan Saidi, *op. cit.*

<sup>68</sup> Agussalim Sitompul, *HMI Dalam Pandangan Seorang Pendeta*, Jakarta : Sinar Harapan, 1991, hal. 38.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

Jakarta, dan mulai terlibat dalam berbagai kegiatan politik, mulai dari masalah kenegaraan, konferensi mahasiswa Asia Afrika dan sampai masalah penggayangan PKI. Kegiatan intelektual HMI paling menonjol terjadi pada masa kepengurusan Deliar Noor (1953-1955)<sup>69</sup>. Kepengurusan tersebut membuat pengkaderan HMI bersemarak dan disertai penerbitan majalah “Media” yang berjalan teratur.

Pada masa Orde Baru HMI tumbuh menjadi kelompok sosiologis daripada organisasi mahasiswa. Mereka yang berstatus alumni HMI masih mempunyai ikatan formal secara emosional. Menindaklanjuti ikatan tersebut alumni HMI mendirikan ormas KAHMI.

Keanggotaan ormas KAHMI mayoritas adalah mantan aktivis tahun 60-an. Pada tahun tersebut, HMI memang mempunyai banyak cerita sukses. Kesuksesan yang diraih dari keberhasilan mengatasi penggayangan CGMI dan ormas antek PKI. Kemudian HMI ikut serta dalam mendirikan Orde Baru melalui KAMI dan Front Pancasila. Setelah itu, ikut serta mengkonsolidasikan Golkar, yang kemudian mengisi lowongan birokrasi pada tahap awal Orde Baru<sup>70</sup>.

### 2.2.2. Pergerakan Mahasiswa Islam

<sup>69</sup> Ridwan Saidi, *op. cit.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

### Indonesia (PMII)

PMII lahir dari lingkungan Nahdatul Ulama (NU). Ketika PMII didirikan pada tanggal 17 April 1960, NU berbentuk sebagai partai politik. NU sendiri memiliki organisasi massa, antara lain Ikatan Pelajar NU (IPNU). Dalam tubuh IPNU terdapat Departemen Kemahasiswaan yang bertugas untuk membina mahasiswa dalam lingkungan NU. Akan tetapi bentuk organisasi dibawah Departemen Kemahasiswaan tidak mampu menampung kebutuhan mahasiswa di IPNU. Atas restu P.B.N.U. didirikan PMII, atas kontribusi Chalid Mawardi, Said Budairy dan Nurul Huda. Ketua pertama diangkat Machbub Djunaedi<sup>71</sup>.

Keterlibatan PMII dalam panggung politik praktis membuat organisasi kader dengan karakter intelektual menjauh dari akar garapan. PMII semakin terkesan organisasi anak partai yang kritis dan anti terhadap kebijakan pemerintah Soeharto sehingga dicurigai dan diawasi. Penyikapan tersebut berakibat kepada kemandekan dan stagnasi organisasi<sup>72</sup>.

<sup>71</sup> Wawancara Drs. Abduh Padere tanggal 24 April 1990. Ridwan Saidi, *Kelompok Cipayung, HMI-GMKI-PMKRI-GMNI-PMII, Analisis Gerakan Kebersamaan dan Pemikiran Ormas Mahasiswa Pasca Aksi Tritura*, (Jakarta : Penerbit LSIP, 1993), hal. 22.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Slamet Effendy Yusuf, Ketua Umum PC. PMII Yogyakarta 1971-1972 dan salah seorang perumus Deklarasi Murnajati, di Jakarta, pada 8 November 1997.

Pada tahun 1972, di kalangan PMII timbul perasaan tidak nyaman dari pengurus karena berstatus “*onderbouw*”, sehingga timbul keinginan untuk independen. Untuk mengakhiri perbedaan pendapat di kalangan PMII muncul gagasan independen atau keluar secara kelembagaan dari NU. Permasalahan terjadi karena perbedaan pendapat di kalangan PMII baru diselesaikan bila organisasi melepaskan diri secara struktural dari partai NU. Kemudian PMII lepas dari NU yang dituangkan dalam sebuah deklarasi di Murnadjati, Malang, pada tahun 1972.

Hasil pertemuan di Murnadjati mencetuskan kebulatan tekad untuk independen (dari NU). Akan tetapi, H. M. Subchan Z.E. enggan dengan keputusan PMII, ia lebih cenderung sikap independen didefinisikan “*independent in kind*”, cara berfikir yang independen. Keinginan PMII untuk independen, pada akhirnya tidak terbendung pada kongres PMII tahun 1973 dicetuskan *manifest Independent*. Sejak itu, PMII independent, bukan lagi merupakan *onderbouw* sesuatu ormas atau parpol.

Kedua organisasi ekstra kampus tersebut, pada saat tahun 1980-an tetap memainkan peran, walaupun dengan kondisi yang berbeda. Penulis telah menceritakan bahwa pada tahun 1980-an gerakan mahasiswa mengalami tekanan

(*pressure*) dan pembatasan terutama organisasi ekstra kampus. Sehingga mengalami transformasi gerakan mahasiswa yang berdampak kepada gerakan mahasiswa yang lemah<sup>73</sup> dan tidak produktif. Gerakan mahasiswa yang melemah, menimbulkan dampak yang berbeda bagi Gerakan Dakwah Kampus. Bagi Gerakan Dakwah Kampus sendiri, tahun 1980-an adalah momentum kelahiran Gerakan Dakwah Kampus yang bermula dari Masjid Salman Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI)<sup>74</sup>.

### 2.3. Gerakan Tarbiyah

#### 2.3.1. Kemunculan Gerakan Dakwah Kampus (GDK)

Mahasiswa merupakan pemuda yang bersifat dinamis yang mengartikulasikan potensinya dengan banyak cara. Pada tahun 1980-an tekanan (*pressure*) kepada pihak mahasiswa lebih besar, direpresentasikan oleh kebijakan NKK / BKK. Sehingga mahasiswa sulit untuk mengaktualisasikan dirinya, terutama yang bersifat politik praktis dengan cara mengoreksi kebijakan pemerintahan. Kebijakan tersebut berdampak kepada potensi mahasiswa

<sup>73</sup> Arbi Sanit, *op. cit.*

<sup>74</sup> Menurut sumber UI Kelahiran Gerakan Dakwah Kampus di UI pada tahun 1984. Sedangkan ITB telah berdiri sebelum UI dengan kegiatan LMD. Wawancara dengan Ust. Aus Hidayat.

yang tidak dapat tersalurkan.

Kebijakan NKK / BKK memang tetap mempersilahkan kehidupan kampus untuk berpolitik. Akan tetapi lingkup politik hanya terfokus dalam kampus dan tokoh-tokoh nasional tidak diperbolehkan untuk berpolitik di kampus. Pihak civitas kampus dipersilahkan untuk berpolitik, akan tetapi hanya lingkup diskusi atau wacana. Sehingga diterjemahkan oleh mahasiswa bahwa tidak ada lagi politik di kampus. Mahasiswa mempunyai pemikiran bahwa politik bukan di dalam kelas (kuliah), namun memberikan kontribusi bagi masyarakat. Dampaknya demonstrasi tidak ada lagi ditemukan, tokoh-tokoh tidak diperbolehkan ke kampus dan setiap kegiatan harus ada perizinan dari birokrasi kampus<sup>75</sup>.

Pada tahun 1978-1984 secara umum merupakan periode pergerakan mahasiswa yang tidak memiliki pilihan dan saluran. Semua keorganisasian ekstra kampus (HMI, PMII, PII, GMNI, PMKRI, GMKI) terpisahkan dengan keorganisasian intra kampus<sup>76</sup>. Sehingga kegiatan ekstra kampus harus diselenggarakan secara penuh di luar kampus. Sementara itu, pihak birokrasi kampus tidak akan memperbolehkan selebaran atau kegiatan atas nama organisasi ekstra kampus masuk ke lingkungan kampus. Kampus harus

bersih dari pengaruh organisasi ekstra kampus. Kondisi ini menyebabkan mahasiswa mengalami kemandulan dalam kegiatan politik.

Birokrasi kampus, yakni pihak rektorat dan dekanat yang menjalankan kebijakan pemerintah turut andil dalam membatasi gerakan mahasiswa. Baik rektorat maupun dekanat menjalankan fungsi yang sama, yaitu mengamankan kampus dari aktivitas politik praktis mahasiswa. Peran dan kontribusi mahasiswa seperti perbaikan dan koreksi kebijakan pemerintah pasca NKK / BKK menjadi dibatasi. Di samping itu, tidak dibolehkan seorang tokoh menjembatani aspirasi mahasiswa untuk berpolitik.

Seorang tokoh nasional yang didukung oleh mahasiswa, yaitu Ali Sadikin, di kenakan tahanan rumah oleh pemerintah tahun 1978, karena dianggap terlalu dekat dengan aktivis mahasiswa. Segala aktivitas yang dilakukan akan diawasi. Sehingga semua tokoh yang menjembatani aspirasi mahasiswa untuk berpolitik tidak diperbolehkan ke kampus, bahkan diawasi<sup>77</sup>.

Kebijakan pemerintah yang membatasi kampus dan pengekanan terhadap tokoh yang dianggap tidak setuju dengan kebijakan Orde Baru pasca tahun 1978, menyebabkan semakin kuat posisi

<sup>75</sup> Wawancara dengan DR. Agus Nur Hadi.

<sup>76</sup> Ridwan Saidi, *op. cit.*, hal. 65.

<sup>77</sup> Wawancara dengan DR. Agus Nur Hadi.

tawar pemerintah dari Soeharto. Apalagi dengan kondisi keadaan perpolitikan di Indonesia, dengan dimulainya kebijakan penyederhanaan atau peleburan partai. Partai yang bercorak Islam dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai-partai Nasionalis dan non-Islam diintegrasikan menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan terakhir Golongan Karya (Golkar). Kemudian di kalangan mahasiswa dikeluarkan kebijakan NKK / BKK, sedangkan di kalangan militer, Soeharto didukung penuh, karena ia adalah jenderal dan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)<sup>78</sup>. Kondisi ini berdampak kepada pemerintahan Soeharto dengan tidak adanya tokoh atau lembaga yang melakukan koreksi dan kritik, apalagi menjadi golongan oposisi dalam pemerintahan Soeharto.

Dampak secara nasional dengan kebijakan pemerintahan Soeharto adalah tidak munculnya tokoh yang memberikan dampak signifikan pada kepemimpinan Indonesia, khususnya pemuda. Peristiwa Malari (15 Januari 1974), banyak tokoh pemuda yang ditangkap. Tokoh-tokoh pada tahun 1978 kebanyakan menjadi orang biasa, seperti ilmuan dan kalangan birokrat.

Di satu sisi gerakan mahasiswa

mengalami pembatasan dan penekanan, di lain pihak muncul mahasiswa yang bergerak di bawah permukaan. Mereka bergerak dengan membina mahasiswa dalam bidang keagamaan, terutama tentang moralitas dan pemahaman agama Islam. Pemahaman yang dibangun melalui kegiatan keagamaan bahwa Islam bukan hanya kegiatan ibadah rutin semata. Akan tetapi, pemahaman Islam yang lebih luas. Metode yang dilakukan dengan cara yang berbeda dari kebiasaan, seperti bedah buku, seminar keagamaan dan mempelajari gerakan Islam di dunia. Adapun gerakan-gerakan Islam yang dipelajari, seperti di Amerika, Inggris, pecahan negara Uni Soviet dan Negara-negara Asia Timur Tengah. Semua hal tersebut dibahas di lingkungan mahasiswa. Dengan tujuan semua mahasiswa merasakan perlu untuk mengikuti aktivitas kegiatan keagamaan<sup>79</sup>.

Sarana yang dimanfaatkan oleh aktivis dalam membina mahasiswa adalah Masjid Arief Rahman Hakim (ARH) yang terletak di kampus Universitas Indonesia Salemba (UI). Pemanfaatan dilakukan karena masjid adalah media yang tidak bersentuhan secara langsung dengan politik kampus. Masjid kemudian menjadi pusat aktivitas pembinaan, khususnya pembinaan aqidah dan akhlak. Di samping

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Ridwan Saidi, *op. cit.*

itu, kondisi tersebut didukung oleh perpolitikan kampus yang sedang mengalami dekadensi karena daya tarik organisasi ekstra kampus menurun dan mahasiswa lebih membutuhkan siraman rohani lebih mendalam<sup>80</sup>.

Salah satu kegiatan yang dilakukan para aktivis atau anak mushola, awalnya dengan menyelenggarakan kajian. Kajian yang dilakukan oleh aktivis dakwah kampus di Masjid ARH UI disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa muslim pada saat itu yang mulai jenuh dengan permasalahan politik. Di sisi lain, belajar membaca Al Qur'an, Studia Islamika, konsultasi keagamaan, serta bimbingan keagamaan mendapat perhatian dikalangan mahasiswa dan masyarakat sekitar. Kajian tersebut bersifat terbuka sehingga baik mahasiswa UI maupun masyarakat sekitar dapat mengikuti kegiatan tersebut.

Selain berusaha melakukan aktivitas pembinaan dikalangan mahasiswa di lingkungan kampus UI, para aktivis dakwah kampus (ADK) juga melakukan hubungan dengan Masjid Salman ITB. Ketika Masjid Salman melaksanakan kegiatan Latihan Muhajid Dakwah (LMD), Masjid ARH UI mengirimkan perwakilan untuk mengikuti acara tersebut.

### 2.3.2. Latihan Mujahid Dakwah

<sup>80</sup> Y. Setyo Hadi, *op. cit.*, hal. 114.

### (LMD)

Pada tahun 1980-1984 kegiatan keagamaan yang dilakukan Gerakan Dakwah Kampus pada awalnya bersifat tidak resmi. Aktivis Dakwah Kampus (ADK) menilai bahwa prioritas pada tahun tersebut bahwa mahasiswa muslim dapat memahami Islam dan dakwah secara menyeluruh (*Syumul*) dan integral (*Syamil*). Bukan karakteristik dakwah yang berbasis kelembagaan<sup>81</sup>.

Pusat kegiatan keagamaan di kampus pada saat itu terbagi dua wilayah, yaitu UI di Rawamangun dan UI Salemba. UI Rawamangun berpusat kepada dua fakultas, yaitu fakultas Sastra dan fakultas Psikologi. UI Salemba, berpusat kepada tiga fakultas, yaitu Fakultas MIPA, Kedokteran dan Teknik<sup>82</sup>.

Aktivitas kegiatan keagamaan dapat dilaksanakan karena peran dari Imaduddin Abdurrahim. Ia adalah seorang intelektual yang turun ke kampus untuk membina mahasiswa di Masjid Salman ITB<sup>83</sup>. Ketika Masjid Salman melaksanakan kegiatan Latihan Muhajid Dakwah (LMD), ADK UI kemudian juga ikut mengirimkan perwakilan untuk

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ust. Aus Hidayat.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Imaduddin adalah salah satu tokoh Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Ia mantan aktivis PII, HMI, serta simpatisan Masyumi. Ia juga pernah ketua IIFSO (*International Islamic Federation Student Organization*). Wawancara dengan Ust. Aus Hidayat.

mengikuti acara tersebut, sebagai perwakilan dari Dakwah Kampus UI.

LMD merupakan satu model latihan dakwah yang dilakukan dengan cara pembentukan kelompok-kelompok kecil dan dibimbing oleh seorang mentor untuk membicarakan segala kehidupan dari cara pandang Islam<sup>84</sup>. Pola kegiatan LMD yang telah dilakukan cukup diminati oleh ADK dan mahasiswa muslim. Karena metode yang digunakan bersifat informal dan berbagi informasi keislaman dengan cara yang menarik.

Metode yang digunakan oleh LMD dinamakan *Nilai-nilai Dasar Islam* (NDI)<sup>85</sup>. Sebelum NDI, dikenal dengan Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang dimiliki oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Akan tetapi, pada saat itu muncul pandangan negatif di kalangan mahasiswa muslim tentang HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam yang lebih berorientasi kepada politik praktis, sehingga mahasiswa muslim kurang tertarik mengikuti kegiatan tersebut. Ketidaktertarikan mahasiswa muslim juga disebabkan oleh kondisi keorganisasian yang dibatasi pemerintah dan birokrasi kampus yang menyebabkan HMI tidak

produktif<sup>86</sup>.

Di pihak lain, kegiatan keagamaan seperti model LMD mendapat respon dan tanggapan positif dari kalangan mahasiswa muslim. Respon positif didorong oleh momentum penerapan NKK/BKK, sehingga mahasiswa muslim lebih tertarik kepada pendalaman pemahaman aqidah dan akhlak dibandingkan politik praktis yang dianggap tidak membuahkan hasil bagi dakwah Islam<sup>87</sup>. Sehingga kegiatan keagamaan yang digunakan seperti LMD mulai tersebar di berbagai kampus lain, seperti UI. Materi yang sangat diminati pada saat itu adalah Perang Pemikiran (*Ghazwatul Fikri*)<sup>88</sup>.

Dampak dari kegiatan keagamaan, tumbuhnya masjid kampus atau mushola-mushola kampus sebagai pusat-pusat kegiatan keislaman. Masjid untuk kegiatan tingkat kampus (universitas), sedangkan mushola lebih dikenal di fakultas-fakultas. Apalagi dengan kegiatan keagamaan tersebut semua mahasiswa muslim bisa terlibat, karena tidak ada hambatan dari pihak kampus.

### 2.3.3. Pengaruh Revolusi Iran

<sup>84</sup> Y. Setyo Hadi, *op. cit.*, hal. 115.

<sup>85</sup> NDI tidak dihubungkan dengan DDII, meskipun mempunyai keterkaitan dengan DII. Tetapi ADK menginginkan kehidupan kampus lebih islami. Wawancara dengan Ust. Aus Hidayat.

<sup>86</sup> Maksud tidak produktif adalah kegiatan hanya seputar wacana dan diskusi, bukan tindakan konkret sebagai gerakan mahasiswa. Wawancara dengan Aus Hidayat Alumni.

<sup>87</sup> Y. Setyo Hadi, *op. cit.*, hal. 113.

<sup>88</sup> Materi Perang Pemikiran, yang bemuatan tentang antara Islam dan Barat. Lebih banyak dikenal dengan istilah *Ghazwul Fikri*.

Kemunculan Gerakan Dakwah Kampus pada waktu awal juga dipengaruhi oleh peristiwa Revolusi Iran 1979. Revolusi Iran adalah peristiwa kejatuhan pemerintahan Reza Pahlevi yang dipimpin oleh Ayatullah Khoimeini, memberikan pengaruh kepada masyarakat Indonesia yang merupakan mayoritas Islam<sup>89</sup>. Akan tetapi, pengaruh yang diberikan dari peristiwa Revolusi Iran bukan penyebaran paham Syi'ah. Contoh penyebaran paham Syi'ah yang dilakukan melalui Majalah *Al Quds* di Masjid ARH UI, tidak berjalan baik<sup>90</sup>.

Penyebaran paham Syi'ah di kampus tidak beriringan dengan pengaruh Revolusi Iran bagi kalangan mahasiswa muslim. Pengaruh Revolusi Iran bagi mahasiswa muslim adalah mahasiswa semakin kurang menyukai untuk berorganisasi secara formal karena tidak menyukai kebijakan pemerintahan saat itu. Sikap tersebut membuat keinginan yang semakin kuat bagi mahasiswa muslim

untuk belajar Islam di masjid<sup>91</sup>. Bahkan sebagian kalangan muslim menilai bahwa revolusi Iran menginspirasi kembali masyarakat muslim di Indonesia untuk kembali kepada nilai-nilai Islam yang disertai maraknya pemakaian simbol-simbol Islam.

Kegiatan LMD dengan metode NDI adalah murni belajar tentang Islam. Buku-buku yang dipelajari untuk belajar Islam, lebih banyak mendapat pengaruh dari Gerakan Islam dari Mesir yaitu Ikhwanul Muslimin. Buku tersebut adalah terjemahan dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, seperti Hasan Al Banna, Sayyid Qutb, Yusuf Qardhawi, Musthafa Masyhur dan sebagainya<sup>92</sup>. Contoh buku untuk belajar Islam, antara lain Risalah Ta'lim dan Petunjuk Jalan. Sehingga Aktivis Dakwah dan mahasiswa muslim murni belajar lebih dahulu tentang keislaman daripada belajar berorganisasi.

### 3.3.4. Perkembangan Awal Dakwah Kampus

Pada tahun 1983-1984, Gerakan Dakwah Kampus mulai muncul ke publik (*Ammah*) secara bertahap. Pembentukan kelompok-kelompok pengajian (mentoring) merupakan tindak lanjut GDK terhadap Dakwah secara personal (*Dakwah Fardiyah*). Akan tetapi organisasi tersebut

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Arsyasyah.

<sup>90</sup> Syi'ah tidak berkembang dikalangan kampus khususnya, masyarakat pada umumnya, disebabkan karena beberapa alasan. Pertama, mahasiswa yang menyebarkan *Yaumul Quds* hanya disadari oleh semangat Islam yang akan bangkit dan menganggap revolusi Iran adalah Revolusi Iran. Kedua, Syi'ah harus berkompetisi dengan paham agama Islam yang ada sebelumnya di Indonesia, yaitu *Ahlusunnah wal jama'ah*, sehingga Syi'ah tidak dapat bertahan. Ditambah dengan resistensi oleh Muhammad Daud Ali, SH (Ketua Umum Masjis ARH UI), dengan mengeluarkan kebijakan yang ketat. Dampaknya surat-surat, buku-buku dan kegiatan harus dicek dan dilaporkan kepada beliau. Y. Setyo Hadi, *op. cit.* 120.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Ust. Aus Hidayat.

<sup>92</sup> H. Setyo Hadi, *op. cit.*, hal. 115.

pada awalnya tidak tampak<sup>93</sup>. Organisasi yang tidak tampak dikalangan kampus dikenal dengan istilah *Organisasi Tanpa Bentuk* (OTB)<sup>94</sup>.

Sebutan GDK yang dikenal dengan OTB pada waktu awal tahun 1980-an, mengutamakan kepada pembinaan terhadap mahasiswa muslim. Sehingga pembinaan yang dilakukan GDK cukup gencar untuk membangun fondasi dakwah dari kampus ke kampus, yang berpusat kepada masjid. Misal perwakilan ADK UI ke ITB, UNAIR, UNAN, UNHAS dan STAN yang bergerak dan berdakwah ke mushola-mushola yang bersifat tertutup<sup>95</sup>.

Pergerakan GDK bersifat tertutup<sup>96</sup> karena pihak kampus yang bersangkutan tidak mengetahui mahasiswa yang melaksanakan *pengajian-pengajian*. Aktivitas Pengajian dilakukan di lingkungan kampus dan kadang di luar kampus. Aktivitas pengajian yang dilakukan ADK berdampak secara personal terhadap mahasiswa muslim yang mengikuti *pengajian-pengajian*. Mahasiswa menjadi lebih alim dan

bermunculan mahasiswi yang berjilbab<sup>97</sup>.

Gerakan Dakwah Kampus muncul bukan berasal dari atas ke bawah (*Top Down*), akan tetapi dari bawah ke atas (*Bottom Up*). Dari gerakan bawah ke atas muncul tokoh-tokoh dan lembaga dakwah kampus. Contohnya pada tahun 1998, diresmikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang merupakan gabungan dari setiap LDK, dibentuk di Malang, Jawa Timur. Kemunculan KAMMI merupakan hasil pertemuan tingkat nasional LDK se-Indonesia di Kampus Muhammadiyah Malang. Tokoh-tokoh yang mulai dikenal pada waktu itu adalah Mustafa Kamal dan Fachry Hamzah<sup>98</sup>.

Pada tahun 1984, aktivitas Gerakan Dakwah Kampus di kalangan mahasiswa mulai tertata, bukan hanya di masjid sebagai instrumen. Tetapi para ADK mulai merefleksikan pemahaman keislaman dengan prestasi di wilayah akademis. Kemudian tahun 1984, aktivitas kampus mulai merambah kepada eksternal kampus. Bentuk aktivitas eksternal kampus pada tahun 1984-1987 mulai

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ust. Aus Hidayat.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Arsyalsyah.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Ust. Aus Hidayat.

<sup>96</sup> Pergerakan GDK pada waktu tertutup, karena baik birokrasi kampus maupun pemerintah cenderung resisten terhadap pergerakan mahasiswa pada waktu itu. Sehingga GDK meminimalisir resistensi dengan pola pergerakan yang tertutup. Wawancara dengan DR. Agus Nur Hadi.

<sup>97</sup> Memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam. Ada kalangan menilai bahwa kemunculan jilbab didukung oleh peristiwa Revolusi Iran, yang membuat sebagian masyarakat muslim di Indonesia terinspirasi untuk kembali kepada nilai-nilai Islam yang disertai pemakaian simbol-simbol Islam, seperti jilbab. dalam menggunakan Wawancara dengan Ust. Aus Hidayat.

<sup>98</sup> Mustafa Kamal Alumni Fakultas Sastra Jurusan Sejarah Angkatan '92 dan Fachry Hamzah Alumni Fakultas Ekonomi Angkatan '92. Arsip FSI.

mengadakan silaturahmi.

Silaturahmi diadakan oleh Lembaga Dakwah Kampus (LDK), yang dibentuk oleh masjid-masjid kampus. Cikal bakal LDK diawali di Bogor, oleh Institut Pertanian Bogor (IPB)<sup>99</sup>. Kemudian menyebar ke setiap kampus. Sehingga peran dakwah kampus mulai terasa oleh para mahasiswa. Wilayah yang cukup dominan untuk perkembangan LDK adalah Jawa. Di Sumatera belum tampak, namun cikal bakal LDK mulai terbentuk. Bagian Indonesia Timur, LDK juga mulai berkembang. Akan tetapi untuk wilayah Sulawesi, perkembangan lebih belakangan dibandingkan dengan daerah yang lain.

Tahun 1984 merupakan era kemajuan dari Dakwah Kampus, karena tekanan kepada mahasiswa muslim mulai berkurang. Kegiatan-kegiatan keagamaan mulai marak, ditambah dengan aktivitas olahraga. Kegiatan olahraga bukanlah berasal dari lembaga olahraga, tetapi Lembaga Dakwah yang mengadakan kegiatan tersebut<sup>100</sup>. Sehingga wilayah aktivitas umum juga menjadi aktivitas Dakwah Kampus.

Kegiatan Dakwah Kampus yang dilaksanakan bertujuan untuk mendidik (men-*tarbiyah*) semua lapisan mahasiswa muslim. Objek utama kegiatan Dakwah Kampus adalah mahasiswa-mahasiswa

yang berasal dari daerah. Relatif mahasiswa daerah lebih dinamis dibandingkan dengan mahasiswa lokal baik waktu, mobilitas dan mudah untuk diajak berpergian. Aktivitas mahasiswa tersebut berdampak kepada kemunculan perhimpunan-perhimpunan mahasiswa daerah.

Sejalan dengan aktivitas Dakwah Kampus yang merambah dan berkembang, ADK juga mulai membina SMA-SMA tempat ia berasal. Pembinaan SMA mulai berjalan secara intensif antara tahun 1986-1989, sehingga kegiatan kampus semakin meningkat. Didukung dengan pelajar yang terbina di SMA. Pelajar tersebut menjadi mahasiswa dan terlibat aktivitas Dakwah Kampus, bahkan tidak jarang menjadi ADK<sup>101</sup>.

Peranan ADK terhadap perkembangan dakwah di SMA mempunyai pengaruh besar. Hubungan yang terjalin antara mahasiswa (ADK) dengan adik kelas (SMA) dinamakan dengan *pembinaan*. Pembinaan yang dimaksud bukan hanya keagamaan, akan tetapi pembinaan akademis. Hubungan tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Salah satu tujuan pembinaan yang dilakukan ADK adalah menyiapkan adik kelas (SMA) yang terbina untuk diterima di Perguruan Tinggi

<sup>99</sup> Wawancara dengan DR. Agus Nur Hadi.

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ust. Aus Hidayat.

Negeri (PTN).

Penyiapan adik kelas untuk mengikuti ujian PTN, menjadi cikal bakal Bimbingan Belajar. Kegiatan Bimbingan Belajar yang diselenggarakan oleh alumni-alumni sekolah. Masyarakat kemudian mulai mengenal Bimbingan Belajar seperti Nurul Fikri (NF), Bimbingan Tes Alumni (BTA) 8 dan BTA 70 untuk wilayah Jakarta, serta wilayah lain yang tidak berbeda jauh<sup>102</sup>.

Salah satu Bimbingan Belajar yang pertama kali dirancang oleh ADK<sup>103</sup> adalah Nurul Fikri (NF). NF sendiri pada waktu awal bernama *Ulul Albab*. Hubungan antara Bimbingan Belajar dan GDK berkaitan erat terhadap perkembangan dakwah kampus. Hubungan tersebut terkait dengan adik kelas (SMA) yang sudah *terbina* di sekolah. Para Mentor yang di sekolah (*Murobbi*) meminta kepada *binaan* untuk masuk ke NF<sup>104</sup>. Penyiapan adik kelas (SMA) untuk ujian PTN dengan mengikuti NF membawa dampak positif. Tidak sedikit yang mengikuti Bimbingan Belajar lulus ujian dengan hasil baik. Keberhasilan para ADK dan mentor (*Murobbi*) sekolah

mendidik adik kelas (SMA), diteruskan kembali kepada adik kelas (SMA). Keberlanjutan tersebut menjadi cikal bakal *Dakwah Sekolah*.

Sekitar tahun 1988, merupakan momentum loncatan dakwah yang diambil oleh Gerakan Dakwah Kampus. Maksud dari loncatan dakwah adalah mewujudkan ekspresi keislaman berupa tampilan keislaman (*simbol-simbol keislaman*). Contoh mulai dikenalkan jilbab (*akhwat*), mahasiswa mulai berjenggot (*ikhwan*) dan penggunaan baju muslim atau “koko”. Tujuan ADK menunjukkan tampilan keislaman bertujuan untuk memperkenalkan jati diri sebagai seorang muslim<sup>105</sup>.

Keinginan ADK untuk memperkenalkan jati diri, disikapi oleh masyarakat dengan beraneka ragam, bahkan tidak sedikit yang melakukan resistensi<sup>106</sup>. Contoh pihak kampus, yaitu dekan atau dosen yang memiliki pandangan negatif, karena menganggap GDK sebagai gerakan yang berbahaya. Satu contoh kasus di kampus UI, masyarakat UI memandang bahwa OTB adalah pengaruh paham Syi'ah. Pandangan yang negatif berdampak kepada ADK dan mahasiswi muslim yang baru menggunakan jilbab mengalami tekanan-

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bambang Suherman.

<sup>103</sup> Aktivistis Dakwah Kampus angkatan pertama di UI Musoli, Arlin Salim, Nursalita, Harna. Wawancara dengan DR. Agus Nur Hadi.

<sup>104</sup> Para mentor (*Murobbi*) sekolah meminta binaan untuk ikut NF, bahkan tidak sedikit mendapat bantuan gratis mengikuti kegiatan belajar di NF. Wawancara dengan Ust. Aus Hidayat.

<sup>105</sup> Wawancara dengan DR. Agus Nur Hadi.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ust. Aus Hidayat.

tekanan<sup>107</sup>.

Bentuk resistensi yang dialami, antara lain dihalangi untuk menggunakan jilbab, bahkan secara akademis mengalami gangguan. Gangguan secara akademis berupa tidak lulus kuliah dan secara halus seolah-olah, dipecat sebagai mahasiswa<sup>108</sup>.

Bentuk resistensi tersebut merupakan sikap kekhawatiran birokrasi kampus dan pemerintah, karena OTB berbahaya kepada kehidupan bernegara.

Sikap kekhawatiran tersebut bertolak belakang dengan aktivitas yang dilakukan ADK. Mereka beraktivitas karena bertujuan untuk berdakwah. Keinginan untuk berdakwah timbul karena perubahan yang signifikan dalam diri sendiri. Proses pembinaan yang berkesinambungan menimbulkan keinginan untuk berdakwah bagi ADK<sup>109</sup>.

Keinginan yang kuat dari ADK untuk berdakwah membuat perkembangan Dakwah Kampus berkembang cepat dan membuat kegiatan keagamaan diminati<sup>110</sup>. Suatu kondisi yang disebabkan mahasiswa yang tidak ada saluran politis yang tepat. Berdampak kepada pilihan mahasiswa muslim untuk belajar tentang keislaman. Kondisi ini memunculkan kebangkitan gerakan kemahasiswaan.

Kebangkitan gerakan mahasiswa

yang dimaksud bukanlah mengangkat kegiatan atau isu politis yang menjadi topik utama. Akan tetapi pemahaman mahasiswa tentang keislaman, yang kemudian dilanjutkan dengan akademis yang lebih bagus. Setelah itu, berlanjut peran Gerakan Dakwah Kampus kepada bidang sosial politik (*Siyasi*).

Pada tahun 1988, aktivitas yang dilakukan ADK lebih banyak terfokus kepada pembelaan-pembelaan dan kasuistik permasalahan Islam. Akan tetapi, pasca tahun 1988-1998 (era reformasi), aktivitas gerakan dakwah kampus bukan hanya di lingkungan masjid atau LDK. Gerakan Dakwah Kampus mulai memasuki lembaga kemahasiswaan yang bersifat formal. contoh ADK mulai masuk ke wilayah Senat Mahasiswa Universitas (SM) atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)<sup>111</sup> yang dilakukan dengan mekanisme formal, yaitu Pemilihan Raya Universitas Indonesia (Pemira UI).

Infiltrasi Gerakan Dakwah Kampus ke lembaga formal kemahasiswaan, karena ADK mempunyai pertimbangan bahwa mereka mempunyai kemampuan dan kapasitas, hanya saja perlu disempurnakan di lapangan<sup>112</sup>. Momentum ADK memasuki lembaga formal kemahasiswaan merupakan metode Gerakan Dakwah Kampus yang berdasarkan Metode

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Wawancara dengan DR. Agus Nur Hadi.

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*

Dakwah Kampus (*Manhaj Dakwah Kampus*).

MDK adalah cara atau metode yang digunakan oleh Gerakan Dakwah Kampus agar setiap universitas kondusif Islami dalam aspek pembinaan keagamaan<sup>113</sup>. Sehingga aktivitas dan kegiatan GDK murni berorientasi kepada mahasiswa muslim untuk memahami nilai-nilai Islam dan dakwah<sup>114</sup>. Pemahaman ADK dan mahasiswa muslim yang telah terbentuk oleh pembinaan, berlanjut kepada penyebaran dakwah (*Nasyrul Fikroh*) yang bersifat kelembagaan yang berdasarkan MDK.

### **BAB III KELAHIRAN LEMBAGA DAKWAH KAMPUS DI UNIVERSITAS INDONESIA**

#### **3.1. Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) I**

Perkembangan dakwah di kampus-kampus ternama seperti UGM, ITB dan kampus lain mengalami perkembangan yang tidak jauh berbeda dengan kampus UI<sup>115</sup>. ADK berupaya berkoordinasi antar kampus dengan tujuan Persatuan Umat (*Ummatan Wahidan*). Untuk mencapai

tujuan, ADK mengupayakan kesamaan ide, perasaan dan cita-cita Islam. Maka GDK membuat jaringan antar universitas di Indonesia dalam bentuk Lembaga Dakwah Kampus (LDK). ADK UI kemudian ikut bergabung dalam Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK)<sup>116</sup>.

Pertemuan FSLDK merupakan momen yang sangat penting karena sebagai media komunikasi antar kampus. Apalagi GDK di UI pada tahun 1980-an, mengalami ketertinggalan beberapa langkah dalam kegiatan keagamaan dibandingkan kampus lain, seperti Masjid Salman ITB<sup>117</sup>. Upaya ADK dalam FSLDK merupakan seruan dari Dr. Nurhay Abdurrahman dalam khutbah Hari Raya Idhul Adha 1408 H / 1988 M di Masjid ARH UI<sup>118</sup>. Ia mengatakan bahwa kebangkitan umat Islam yang sering didengarkan harus disambut dengan kesadaran untuk memperbaiki kondisi, membangun kesatuan umat dan memperkuat tali persaudaraan Islam (*Ukhuwah Islamiyah*). Hal itu harus dimanifestasikan dalam langkah-langkah yang konkret terutama pembinaan akhlak umat di mana saja termasuk di kampus-

<sup>113</sup> Wawancara dengan Ust. Aus Hidayat.

<sup>114</sup> Tokoh yang berperan untuk membentuk membuat MDK adalah Almarhum DR. Heru, Irwan Prayitno, Sumanjaya, Ust. Aus Hidayat dan DR. Agus Nur Hadi. *Ibid*.

<sup>115</sup> Y. Setyo Hadi, *op. cit.*, hal. 122.

<sup>116</sup> FSLDK pertama kali dilaksanakan se-Jawa di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, perwakilan dari UI adalah Asep Saeful Rahmat dan Irhamni. Keduanya adalah mahasiswa aktif di UI pada saat itu.

<sup>117</sup> Y. Setyo Hadi, *op. cit.*, hal. 123.

<sup>118</sup> Dr. Nurhay Abdurrahman Ketua I Masjid ARH UI periode 1988-1991.